

ANALISIS *REINVENTING GOVERNMENT* TERHADAP PEMIKIRAN DAN KEBIJAKAN
BASUKI TJAHAYA PURNAMA
(Januari 2013 – Desember 2014)

Oleh
S u w a r d i

Abstract

Tjahaya Basuki Purnama (Ahok) Head of Jakarta Special Capital Region efforts led Jakarta lot with new ideas are widely publicized by mediamassa online. This study analyzes the thinking and policy Ahok in managing the bureaucracy of reinventing government (D. Osborn and T. Gabler; 1993). The results research showed that Ahok have tend build Jakarta governance in line with the principle of ten reinventing government. The top three concerns highest Ahok first thought was a statement in the category of anticipatory governance principles (21.92%); Second principle is mission driven government (17.11%); The third principle community owned government (12.30%).

Keywords: Ahok; reinventing; Government; Jakarta

Pendahuluan

Buku “*reinventing government, how intreprenurial spirit is transporming in the public sector*” karya David Osborn dan Peter Plastrik (1993) dikategorikan sebagai salahsatu karya yang banyak dibaca kalangan pemerhati ilmu administrasi. Walaupun bukan untuk pertamankali, usaha menginjeksi semangat kewirausahaan ke dalam sector public, buku tersebut memberikan nuansa aplikasi penerapan disektor pengelolaan sumberdaya pemerintah lebih mudah di pahami.

Dalam rumah besar studi ilmu administrasi, pemikiran Osborn dan plastic (1990) tersebut berapa dalam paradigm *new public administration*. Hakekatnya adalah melirik tatakelola organisasi sector swasta atau bisnis untuk dapat diterapkan di sector public atau pemerintahan. Menurut Acampo (1998) terdapat beragam terminologi yang mengacu pada konsep *new public administration* antara lain: *reinventing government* atau *interpreneurial government* (Osborne dan Gaebler, 1993), *business process reengineering* (Hammer and Champy, 1993), *market-based public administration* (Rossenblom,1993), *post-bureaucracy* (Bazelay,1992), *managerialism* (Pollit,1993), dan *New Public Management* (NPM). Istilah NPM sendiri diperkenalkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Apapun label yang dipergunakan, yang jelas pendekatan manajemen profesional ini telah merubah

orientasi fokus peran dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang semula lebih mementingkan “*process*” menuju ke “*product*”, atau dari “*rule governance*” menuju ke “*goal governance*” (Suryono; 2000).

Dorongan kuat untuk mengubah paradigma *classical public administration* itu disebabkan oleh berbagai praktek kurang memuaskan di sector public. Menurut Islamy (1998:7), terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan birokrasi publik mengalami *organizational slack* yaitu antara lain pendekatan atau orientasi pelayanan yang kaku, visi pelayanan yang sempit, penguasaan terhadap *administrative engineering* yang tidak memadai, dan semakin bertambah gemuknya unit-unit birokrasi publik yang tidak difasilitasi dengan 3P (personalia, peralatan dan penganggaran) yang cukup dan handal (*viable bureaucratic infrastructure*). Akibatnya, aparat birokrasi publik menjadi lamban dan sering terjebak ke dalam kegiatan rutin, tidak responsif terhadap aspirasi dan kepentingan publik serta lemah beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Sebagai konsekuensinya, perlu dipertanyakan mengenai posisi aparat pelayanan ketika berhadapan dengan masyarakat atau kliennya.

Seiring dengan perkembangan dunia keilmuan dalam praktek administrasi di Indonesia pasca reformasi 1998 dan dimulainya era otonomi daerah, menjadikan pemerintah dan pemerintah daerah menjadi

lebih fleksible dalam pengelolaan pemerintah daerah. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri perubahan dalam dunia pikir (keilmuan) tidak semudah dalam dunia praktek. Apalagi berhubungan dengan karakter, budaya kerja dan *mainset* birokrasi yang selama ini telah berurat dan berakar.

Tatakelo yang menjadi titik perhatian penelitian ini adalah tatakelola Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI – Jakarta) di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama periode 2012 – 2017. Jokowi panggilan akrab Gubernur Joko Widodo dan Ahok sebutan untuk Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama. Pasangan ini ditetapkan dan dilantik setelah memenangi putaran kedua pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Pasangan Jokowi – Ahok mengusung *take line* Jakarta baru untuk diwujudkan dalam masa jabatan lima tahun hingga 2017.

Duo sejoli Jokowi – Ahok dinilai banyak pihak sangat kompak menjalankan pemerintahan DKI. Setidaknya di permukaan tidak menampakan adanya perbedaan apalagi konflik dalam menjalankan peran dan fungsi masing – masing. Sebagaimana diakui sendiri oleh Jokowi, lebih banyak melakukan komunikasi pembangunan kemasayarakat. “Blusukan” itulah sebutan populer model komunikasi politik dan pembangunan selama menjabat di pemerintahan.

Sementara itu Ahok lebih banyak berkonsentrasi melakukan penataan internal birokrasi. Sebagai Wakil Gubernur aktivitas Ahok dalam birokrasi lebih pada membantu Gubnur dalam proses penataan birokrasi. Namun demikian karena pemikiran kebijakan Jokowi dan Ahok semata diorientasikan untuk membangun Jakarta dan melayani masyarakat dan jauh dari adanya kepentingan maka seringkali Ahok memiliki keleluasaan dalam mengembangkan pemikiran terobosan yang sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Gubernur Jokowi.

Berbagai gagasan kebijakan baik yang masih pada tataran wacana hingga yang telah benar – benar diimplementasikan dan menampakan hasil atau dampak kebijakan memperoleh perhatian luas. Perhatian masyarakat tersebut tercermin dari banyaknya pemberitaan dan diskusi di jejaring social.

Kerangka pemikiran dan kebijakan pemerintahan DKI menampakan kecenderungan mengejar rasionalitas dalam mencapai tujuan pemerintahan dibidang pembangunan, pelayanan dan kemasyarakatan. Nilai – nilai ekonomi, efisien dan efektifitas birokrasi lebih menonjol. Ada pergeseran praktek birokrasi dari model *role* ke *goal orientation* (Suryono; 2002). Tatakelola pemerintahan yang lebih menekankan fungsi dibanding struktur (Pollit; 1997). *Reinventing government* (Osbor dan Gabler; 1992)

Pemikiran David Osborne dan Ted Gabler (1993) dalam buku *Reinventing Government*, menjelaskan tentang bagaimana spirit kewirausahaan ditransformasikan ke sektor publik. Kewirausahaan yang dipahami sebagai suatu aktivitas memindahkan sumberdaya dari wilayah dengan produktivitas rendah ke wilayah yang lebih produktif. Terdapat 10 Pemikiran Osborn dan Gabler (1993) untuk membangun birokrasi berorientasi pada tujuan (*goal orientation*), yang ia namakan sebagai *ten program for reinventing government*. Kesepuluh pemikiran ini adalah *Pertama, pemerintahan katalis: mengarahkan ketimbang mengayuh*. Artinya, jika pemerintahan diibaratkan sebagai perahu, maka peran pemerintah seharusnya sebagai pengemudi yang mengarahkan jalannya perahu, bukannya sebagai pendayung yang mengayuh untuk membuat perahu bergerak. Pemerintah entrepreneurial seharusnya lebih berkonsentrasi pada pembuatan kebijakan-kebijakan strategis (*mengarahkan*) daripada disibukkan oleh hal-hal yang bersifat teknis pelayanan (*mengayuh*).

Kedua, pemerintahan milik rakyat: memberi wewenang ketimbang melayani. Artinya, birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Hal ini bertentangan dengan kemerdekaan sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus diganti dengan menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka sendiri. Pemberdayaan semacam ini nantinya akan menciptakan iklim partisipasi aktif rakyat untuk mengontrol pemerintah dan menumbuhkan

kesadaran bahwa pemerintah sebenarnya adalah milik rakyat.

Ketiga, pemerintahan yang kompetitif: menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. Artinya, berusaha memberikan seluruh pelayanan tidak hanya menyebabkan risorsis pemerintah menjadi habis terkuras, tetapi juga menyebabkan pelayanan yang harus disediakan semakin berkembang melebihi kemampuan pemerintah (organisasi publik), hal ini tentunya mengakibatkan buruknya kualitas dan efektifitas pelayanan publik yang dilakukan mereka. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan kompetisi (persaingan) di antara masyarakat, swasta dan organisasi non pemerintah yang lain dalam pelayanan publik. Hasilnya diharapkan efisiensi yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar dan terbentuknya lingkungan yang lebih inovatif.

Keempat, pemerintahan yang digerakkan oleh misi: mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan. Artinya, pemerintahan yang dijalankan berdasarkan peraturan akan tidak efektif dan kurang efisien, karena bekerjanya lamban dan bertele-tele. Oleh karena itu, pemerintahan harus digerakkan oleh misi sebagai tujuan dasarnya sehingga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Karena dengan mendudukkan misi organisasi sebagai tujuan, birokrat pemerintahan dapat mengembangkan sistem anggaran dan peraturan sendiri yang memberi keleluasaan kepada karyawannya untuk mencapai misi organisasi tersebut.

Kelima, pemerintahan yang berorientasi hasil: membiayai hasil, bukan masukan. Artinya, bila lembaga-lembaga pemerintah dibiayai berdasarkan masukan (*income*), maka sedikit sekali alasan mereka untuk berusaha keras mendapatkan kinerja yang lebih baik. Tetapi jika mereka dibiayai berdasarkan hasil (*outcome*), mereka menjadi obsesif pada prestasi. Sistem penggajian dan penghargaan, misalnya, seharusnya didasarkan atas kualitas hasil kerja bukan pada masa kerja, besar anggaran dan tingkat otoritas.

Keenam, pemerintahan berorientasi pelanggan: memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan boirokrasi. Artinya, pemerintah harus belajar dari sektor bisnis di mana jika tidak fokus dan perhatian pada pelanggan (*customer*), maka warga negara tidak akan puas dengan pelayanan yang ada atau tidak bahagia. Oleh karena itu, pemerintah harus

menempatkan rakyat sebagai pelanggan yang harus diperhatikan kebutuhannya. Pemerintah harus mulai mendengarkan secara cermat para pelanggannya, melalui survei pelanggan, kelompok fokus dan berbagai metode yang lain.

Ketujuh, pemerintahan wirausaha: menghasilkan ketimbang membelanjakan. Artinya, sebenarnya pemerintah mengalami masalah yang sama dengan sektor bisnis, yaitu keterbatasan akan keuangan, tetapi mereka berbeda dalam respon yang diberikan. Daripada menaikkan pajak atau memotong program publik, pemerintah wirausaha harus berinovasi bagaimana menjalankan program publik dengan dengan sumber daya keuangan yang sedikit tersebut. Dengan melembagakan konsep *profit motif* dalam dunia publik, sebagai contoh menetapkan biaya untuk *public service* dan dana yang terkumpul digunakan untuk investasi membiayai inoasi-inovasi di bidang pelayanan publik yang lain. Dengan cara ini, pemerintah mampu menciptakan nilai tambah dan menjamin hasil, meski dalam situasi keuangan yang sulit.

Kedelapan, pemerintahan antisipatif: mencegah daripada mengobati. Artinya, pemerintahan tradisional yang birokratis memusatkan pada penyediaan jasa untuk memerangi masalah. Misalnya, untuk menghadapi sakit, mereka mendanai perawatan kesehatan. Untuk menghadapi kejahatan, mereka mendanai lebih banyak polisi. Untuk memerangi kebakaran, mereka membeli lebih banyak truk pemadam kebakaran. Pola pemerintahan semacam ini harus diubah dengan lebih memusatkan atau berkonsentrasi pada pencegahan. Misalnya, membangun sistem air dan pembuangan air kotor, untuk mencegah penyakit; dan membuat peraturan bangunan, untuk mencegah kebakaran.

Kesembilan, pemerintahan desentralisasi: dari hierarki menuju partisipasi dan tim kerja. Artinya, pada saat teknologi masih primitif, komunikasi antar berbagai lokasi masih lamban, dan pekerja publik relatif belum terdidik, maka sistem sentralisasi sangat diperlukan. Akan tetapi, sekarang abad informasi dan teknologi sudah mengalami perkembangan pesat, komunikasi antar daerah yang terpencil bisa mengalir seketika, banyak pegawai negeri yang terdidik dan kondisi berubah dengan kecepatan yang luar biasa, maka pemerintahan desentralisasilah yang paling

diperlukan. Tak ada waktu lagi untuk menunggu informasi naik ke rantai komando dan keputusan untuk turun. Beban keputusan harus dibagi kepada lebih banyak orang, yang memungkinkan keputusan dibuat "ke bawah" atau pada "pinggiran" ketimbang mengonsentrasikannya pada pusat atau level atas. Kerjasama antara sektor pemerintah, sektor bisnis dan sektor *civil society* perlu digalakkan untuk membentuk tim kerja dalam pelayanan publik.

Kesepuluh adalah *pemerintahan berorientasi pasar: mendongkrak perubahan melalui pasar*. Artinya, daripada beroperasi sebagai pemasok masal barang atau jasa tertentu, pemerintahan atau organisasi publik lebih baik berfungsi sebagai fasilitator dan pialang dan menyemai pemodal pada pasar yang telah ada atau yang baru tumbuh. Pemerintahan *entrepreneur* merespon perubahan lingkungan bukan dengan pendekatan tradisional lagi, seperti berusaha mengontrol lingkungan, tetapi lebih kepada strategi yang inovatif untuk membentuk lingkungan yang memungkinkan kekuatan pasar berlaku. Pasar di luar kontrol dari hanya institusi politik, sehingga strategi yang digunakan adalah membentuk lingkungan sehingga pasar dapat beroperasi dengan efisien dan menjamin kualitas hidup dan kesempatan ekonomi yang sama.

Berbagai pemikiran dan langkah kebijakan dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama dalam mengelola birokrasi Pemerintah DKI Jakarta. Pemikiran dan kebijakan tersebut banyak diberitakan oleh media khususnya media *online* seperti: *inilah.com*; *kompas.com*; *detik.com*; *beritasatu.com*; *tribunnews.com* dan sebagainya. Selain dijadikan bahan pemberitaan pemikiran dan langkah kebijakan tersebut juga secara resmi diunggah di portal video *youtobe*.

Penelitian menelusuri konten pemikiran dan langkah kebijakan melalui media – media tersebut. Identifikasi tanggal, sumber informasi dan data; konten kemudian diberikan penafsiran dan dianalisis dari sudut pandang prinsip – prinsip *reinventing government*.

Rumusan masalah penelitian ini: “bagaimanakah analisis *reinventing government* dari terhadap pemikiran dan kebijakan Basuki Tjahaya Purnama dalam mengelola birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta. Apakah pemikiran dan kebijakan Basuki Tjahaya Purnama dalam mengelola

birokrasi Pemerintahan DKI Jakarta, sesuai dengan prinsip *reinventing government*.

Metode Penelitian

Berdasarkan metode data yang dikembangkan penelitian ini cenderung dapat dikategorikan sebagai konten analisis. Analisis konten adalah metode penelitian untuk menentukan keberadaan kata-kata atau konsep-konsep di dalam teks atau satu set rangkaian teks. Pengertian teks dapat diterjemahkan secara luas seperti buku-buku, bagian buku, essay, interview, diskusi, halaman muka surat kabar dan artikel, dokumen bernilai sejarah, pidato-pidato, pembicaraan, iklan, teater, percakapan informal, atau bahasa komunikasi apa saja yang muncul. Isi dari surat kabar atau surat kabar elektronik merepresentasikan keputusan, pilihan yang dibuat oleh seseorang.

Obyek kajian penelitian ini adalah pemikiran dan kebijakan. Sumber data dan informasi pemikiran dan kebijakan Basuki Tjahaya Purnama sebagai materi utama penelitian ini diperoleh dari sumber – sumber informasi yang tersedia dan dapat diakses publik secara luas.

Teknik pengumpulan data yang berasal dari portal *youtobe* dilakukan dengan membuka laman video yang memiliki judul dengan kata kunci: Ahok; dan atau Basuki Tjahaya Purnama; dan atau Pemerintah DKI Jakarta. Hal yang sama dilakukan untuk menelusuri sumber data dan informasi dari media *online*. Setelah video dan atau media *online* diakses peneliti melakukan *screening* apakah konten media tersebut berhubungan dengan pemikiran dan kebijakan Basuki Tjahaya Purnama dalam mengelola birokrasi Pemerintahan DKI atau tidak? Jika tidak maka konten media tersebut tidak diabaikan, Jika ya dijadikan data dan informasi penelitian untuk selanjutnya dilakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini tidak melengkap data melalui hasil wawancara dan dokumentasi, sebagai akibat keterbatasan penelitian.

Secara umum teknis analisis dan penafsiran dilakukan dengan metode *anggulasi*, terdiri dari sajian data, reduksi dan penafsiran; serta penarikan kesimpulan. Langkah – langkah penafsiran dan penarikan kesimpulan dilakukan sebagai berikut: (1) Identifikasi laman sumber data dan informasi yang telah lolos *screening*

berdasarkan alamat web; tanggal; dan kategorisasi penafsiran konten data dan informasi berdasarkan prinsip *reinventing government*; (2) identifikasi frekuensi data dan informasi berdasarkan prinsip *reinventing government*; (3) membandingkan konteks data dan informasi dengan prinsip *reinventing government*; (4) analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Basuki Tjahaja Purnama atau yang sering disapa dengan nama AHOK merupakan politikus berasal dari daerah “laskar pelangi” Belitung. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Ahok berpasangan dengan Joko Widodo atau Jokowi, Ahok berposisi sebagai Wakil Gubernur. Pada Pilkada Gubernur DKI tahun 2012 itu, Jokowi dan Ahok terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sebelum berpasangan dipasangkan dengan Jokowi, Ahok adalah politisi di Senayan berada di Fraksi Golongan Karya DPR RI 2009 – 2014. Sebelumnya, Ahok menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.

Usai pemilihan umum presiden (pilpres) 2014 Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Yusuf Kalla menang atas pasangan rivalnya Probowo Subianto – Hatta Rajasa. Dilantikannya Jokowi sebagai presiden RI 2014 – 2019 menjadikan Ahok naik dari Wakil Gubernur menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga tahun 2017.

Posisi Gubernur yang diduduki Ahok menjadikan dirinya lebih bebas untuk mengekspresikan gagasan dan pemikirannya dalam kerangka kebijakan khususnya di dalam penataan birokrasi pemerintahan. Ketika masih sebagai Wakil Gubernur, Ahok memiliki keterbatasan mewujudkan pemikirannya itu. Pemikiran – pemikiran Ahok yang cenderung banyak mengundang kontroversi pada tataran bergantung pada kebijakan sang Gubernur Jokowi. Walaupun sulit menemukan pertentangan wacana pemikiran kebijakan antara Ahok selaku Wakil Gubernur dan Jokowi, tak dapat dipungkiri pemikiran “revolusioner” Ahok terkendala oleh gaya dan kebijakan Jokowi.

Penelitian ini memiliki rentang waktu Januari 2013 sampai dengan akhir Desember 2014. Posisi Ahok sebagai obyek penelitian

berada dalam dua Jabatan, yaitu selaku Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Pelaksanaan pengumpulan data Januari 2013 – 19 November 2014 ketika berposisi sebagai Wakil Gubernur, selebihnya hingga akhir Desember 2015 pengumpulan data dilakukan ketika Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi.

Tabel 1 menggambarkan distribusi pernyataan pemikiran Ahok berkaitan dengan prinsip *ten program for reinventing government* (Osborn dan Plastriect, 2002). Selama 24 bulan Januari 2013 hingga Desember 2015, Ahok telah mengeluarkan pernyataan sebanyak 187 pernyataan, atau rata – rata 9,35 pernyataan per bulan. Pernyataan Ahok terbanyak terjadi di bulan Januari 2014 sebanyak 20 kali pernyataan; dan di bulan Februari 2014 sebanyak 39 kali pernyataan. Selama dua tahun itu (24 Bulan) teridentifikasi dua bulan Ahok tidak menyampaikan pernyataan terkait dengan prinsip *ten program for reinventing government*, yaitu bukan September dan Oktober 2014, atau selama dua bulan berturut – turut.

Beberapa hal perlu dicermati sebagai temuan penelitian ini:

- 1) frekuensi pernyataan Ahok selaku pejabat public terkait dengan kebijakan pemerintahan dan birokrasi terbilang tinggi (rata – rata perbulan 9,35 kali perbulan). Hal ini dapat dimaknai bahwa: (1) Ahok memiliki banyak gagasan dalam usaha melakukan pembenahan birokrasi. Memang tidak ada pembandingan data apple – to – apple hasil penelitian pejabat lain. Namun secara umum sorotan media ke Ahok terbilang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena Ahok dipandang sebagai sosok pejabat dari latarbelakang yang tidak banyak dijumpai sebagaimana cuplikan profilnya; (2) Ahok menggunakan media massa sebagai bagian penting dalam proses kebijakan. Hal ini diduga karena kenyakinannya bahwa media massa mampu menumbuhkan sikap kritis yang rasional atas sebuah kebijakan pemerintahan. Kebijakan menuju tatakelola pemerintahan yang baik membutuhkan dukungan public yang kuat karena dipastikan terjadi resistensi kepentingan yang telah mengakar dalam praktek birokrasi lama. Dengan model

komunikasi public melalui mediamassa semacam itu, Ahok memperoleh tiga manfaat sekaligus, yaitu dukungan public, promosi gagasan, dan sebagai politisi menaikkan daya tawar *political personal assessment*.

- 2) Ahok dilantik sebagai Gubernur pada 19 November 2014. Dua bulan sebelum dilantik, yakni bulan September dan November 2015 tidak ada pernyataan yang dilontarkan berkenaan dengan penataan birokrasi pemerintahan. Hal ini diduga karena menjelang pelantikan terjadi resistensi dari sebagian kalangan masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Kelompok masyarakat yang dipelopori Fron Pembela Islam yang diketua Habib Rizik lantang menyuarakan penolakan Ahok Sebagai Gubernur menggantikan Jokowi. Sedangkan kalangan DPRD dibawah partai – partai koalisi merah putih (KMP) dibawah komando Partai Gerindra, melalui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra selalu meojokan dan mencari berbagai dalih untuk menentang Ahok menjadi Gubernur. Memanasnya situasi politik dua bulan menjelang pelantikan Ahok menjadi Gubernur itulah kiranya yang mengerem Ahok untuk menyuarakan gagasan – gagasan tentang reformasi birokrasi ditubuh pemerintahan DKI Jakarta.
- 3) Pada Bulan desember 2014 bulan berikutnya setelah Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, hanya sekali mengeluarkan pernyataan berkenaan dengan penataan birokrasi pemerintahan. Nampaknya setelah menjadi orang nomor satu, Ahok masih disibukan dengan urusan politik, yaitu pengangkatan penggantinya sebagai Wakil Gubernur DKI. Seperti diketahui bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta seganti Ahok adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P) Jarot Saiful resmi dilantik menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sayang penelitian ini hanya sampai di bulan Desember 2015 saja. Setelah kondisinya politik pemerintahan stabil setelah hingar bingar pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur usai, belum terlacak data terkait dengan pemikiran Ahok tentang penataan

birokrasi dari perspektif *ten program for reinventing government*.

Tabel 1: Distribusi Rata – rata Pernyataan Ahok Berkaitan dengan Prinsip *Ten Program for Reinventing Government* 14 Bulan (Mei 2013 – Desember 2014)

Bulan	JUMLAH	
	F	%
Januari 2013	13	9%
Februari 2013	10	7%
Maret 2013	11	8%
Apr-13	8	6%
Mei – 2013	9	6%
Juni – 2013	9	6%
Juli – 2013	8	6%
Agustus - 2013	2	1%
Sep-13	8	6%
Oktober 2014	3	2%
Nov-13	8	6%
Desember 2013	3	2%
Januari 2014	20	14%
Februari 2014	39	27%
Maret 2014	5	3%
Apr-14	6	4%
Mei – 2014	1	1%
Juni – 2014	7	5%
Juli – 2014	3	2%
Agustus - 2014	4	3%
Sep-14	0	0%
Oktober 2014	0	0%
Nov-14	9	6%
Desember 2014	1	1%
Jumlah	187	
Rata - rata perbulan	9.35	

Sumber: Data penelitian (2014)

- 4) Tengah tahun pertama 2013 (Januari – Juli) Ahok cenderung produktif dalam mengeluarkan gagasan penataan birokrasi. Rata – rata sebanyak 9,7 kali perbulan. Pernyataan Ahok di bulan – bulan ini nampaknya digunakan untuk mengimbangi gaya pemerintahan Jokowi yang terkenal dengan istilah “blusukan” yang banyak menjadi liputan luas media massa. Ahok tidak ingin tenggelam oleh pemberitaan blusukannya sang gubernur ketika itu, dengan rajin memproduksi gagasan – gagasan penataan birokrasi. Sehingga para pengamat ketika itu, tanpa ada pernyataan resmi dari pemimpin pemerintahan DKI Jakarta, berani

menyatakan bahwa ada sinergi yang baik, pembagian pekerjaan antara Jokowi dan Ahok. Jokowi lebih banyak diluar untuk menjangkau aspirasi, monitoring dan evaluasi kebijakan dilapangan, sedangkan Ahok melakukan pembenahan internal birokrasi. Kedua tokoh pimpinan ini nampak kompak setidaknya dari pemberitaan yang ada.

Tabel 2 menyajikan data sebaran pernyataan Ahok yang dikelompokkan dalam prinsip *ten program for reinventing government* (Osborn dan Plastrick, 2000). Dari 187 pernyataan Ahok selama kurun waktu 24 bulan (2 tahun) berdasarkan sumber data dari media massa on line, rangking tertinggi **pertama** adalah pernyataan dalam kategori prinsip pemerintahan antisipatif (21,92%); **kedua** prinsip pemerintahan yang digerakan oleh misi (17,11%); **ketiga** prinsip pemerintahan milik masyarakat; **keempat** prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil (10,17%); **kelima** prinsip pemerintahan wirausaha (9,10%); **keenam** prinsip pemerintahan katalis (8,06); **ketujuh** prinsip pemerintahan berorientasi pada pelanggan (8,02%); **kedelapan** prinsip pemerintahan kompetitif; **kesembilan** prinsip pemerintahan berorientasi pada pasar (3,74) dan terakhir, yaitu **kesepuluh** prinsip pemerintahan desentralisasi.

Data table 2 sebagai temuan penelitian dapat dianalisis dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Secara umum Ahok memiliki konsistensi pemikiran pembenahan tatakelola birokrasi pemerintahan sejalan dengan pemikiran David Osborn dan Peter Plastrick (2000) tentang *ten program for reinventing government*. Dalam ilmu administrasi Ahok menganut paham paradigma *new public manajemen*. Sebagaimana diketahui paradigma ini hakekatnya adalah mengelola birokrasi dengan cara *private business process reengineering* (Hammer and Champy, 1993), *market-based public administration* (Rossenblom, 1993), *post-bureaucracy* (Bazelay, 1992), *managerialism* (Pollit, 1993). Larbi (1999) mendiskripsikan NPM:

“New public management (NPM), management techniques and practices drawn mainly from the private sector, is

increasingly seen as a global phenomenon. NPM reforms shift the emphasis from traditional public administration to public management. Key elements include various forms of decentralizing management within public services (e.g., the creation of autonomous agencies and devolution of budgets and financial control), increasing use of markets and competition in the provision of public services (e.g., contracting out and other market-type mechanisms), and increasing emphasis on performance, outputs and customer orientation. NPM reforms have been driven by a combination of economic, social, political and technological factors”.

Tabel 2: Distribusi Pernyataan Ahok Berkaitan dengan Prinsip *Ten Program for Reinventing Government* (Mei 2013 – Desember 2014)

Re-inventing government	Jumlah	Persentase %
Pemerintahan Katalis	15	8,06 %
Pemerintah Milik Masyarakat	23	12,30 %
Pemerintah Kompetitif	12	6,41 %
Pemerintah Yang Digerakkan Oleh Misi	32	17,11 %
Pemerintah Berorientasi Pada Hasil	19	10,17 %
Pemerintah Berorientasi Pada Pelanggan	15	8,02 %
Pemerintah Wirausaha.	17	9,10 %
Pemerintah Antipasif	41	21,92 %
Pemerintah Desentralisasi.	6	3,21 %
Pemerintah Berorientasi Pada Pasar.	7	3,74 %
Jumlah	187	100%

Sumber: Data Penelitian (2014)

Kelebihan paradigma ini dibanding dengan paradigma sebelumnya *classical public administration* (Shafritz dan Hyde; 1978) terletak pada kemampuannya untuk menawarkan gagasan pengelolaan organisasi secara lebih efektif, efisien dan ekonomis. Selain menawarkan kelebihan NPM juga membawa kabar kurang menguntungkan dalam praktek birokrasi. Tarigan (2003) mempertanyakan sejauh mana prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dapat diterapkan ke dalam proses manajemen sektor publik ?. Terdapat perbedaan karakter antara sektor swasta dan pemerintah. Perbedaan tersebut berkaitan dengan masalah pilihan publik (*public choice*), kepentingan publik (*public interest*), pemilikan publik (*public*

ownership), pemerataan, kebutuhan kolektif, keadilan, dan nilai-nilai semacamnya. Sedangkan Owolu (2004) menjelaskan bahwa *NPM* berbahaya bagi kelompok masyarakat marginal. Mereka yang secara ekonomi tidak mampu, tidaklah dapat ditempatkan pada posisi pelanggan. Pelayanan pemerintahan yang baik dan berbayar tidak dapat diakses oleh masyarakat pinggiran. Peran Negara dalam paradigma *NPM* menjadi kerdil tergantikan oleh pola pikir swasta. Karena itu pada tataran berikutnya *NPM* tidak populer, perlu disempurnakan guna menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik. *Good governance*.

2. Tiga prinsip dalam *ten program for reinventing government* yang banyak dikemukakan oleh Ahok adalah pemerintahan antisipatif (21,92%); Pemerintahan digerakan oleh misi (17,11%); dan pemerintahan milik masyarakat. Perhatian yang besar pada ketiga prinsip ini menunjukkan bahwa Ahok menghendaki sebuah tatakelola pemerintahan yang tidak sekedar menjadi pemadam kebakaran. Bertindak manakala terjadi suatu masalah yang segera harus diselesaikan. Pemerintahan yang antisipatif adalah pemerintahan berpikir kedepan. Menelorkan kebijakan sebagai antisipasi sehingga kedepan tidak muncul problem sebagaimana yang dipikirkan
3. Konsern kedua Ahok pada pemerintahan yang digerakan oleh misi. Ahok ingin keluar dari pakem birokrasi yang cenderung mengedepankan aturan. Selama ini berokrasi bekerja dibalik rumitnya aturan. Birokrasi kadang terbelenggu oleh aturan itu, atau malah yang sering terjadi para birokrat berlindung pada aturan ketika kebijakan – kebijakan yang dijalankan justru merugikan kepentingan umum, kepentingan pemerintahan. Dibalik kesulitan karena aturan itu seringkali oknum birokrat memetik keuntungan secara pribadi. Ahok menginginkan sebuah system pemerintahan yang keluar dari aturan, bukan aturan yang menjadi tujuan operasionalisasi birokrasi. Bukan aturan yang menggerakkan roda pemerintahan. Birokrasi dan seluruh elmen di dalamnya bekerja dengan panduan visi, misi dan tujuan. Aturan semestinya dipahami sebagai

mekanisme standar pencapaian tujuan, maka ketika aturan itu justru menghambat pencapaian aturan maka aturan itu perlu disesuaikan dengan kondisi tuntutan pekerjaan. Tata kelola pemerintah “*out of the box*” berpikir rasional menggunakan akal dan nalar.

4. Sedangkan konsern tertinggi ketiga adalah pemerintahan milik masyarakat. Nampaknya Ahok menghendaki sebuah model pemerintahan yang memberdayakan ketimbang melayani “*empowering rather than serving*”. Masyarakat didorong untuk ikut berpartisipasi mengelola problem kehidupan, dengan fasilitasi dari pemerintah. Ada pelibatan masyarakat dalam menjalankan tatakelola pemerintah. Pemerintah hadir ditengah – tengah masyarakat yang sedang menjalani berbagai problem kehidupan bersama. birokrasi pemerintahan yang berkonsentrasi pada pelayanan menghasilkan ketergantungan dari rakyat. Hal ini bertentangan dengan kemerdekaan sosial ekonomi mereka. Oleh karena itu, pendekatan pelayanan harus diganti dengan menumbuhkan inisiatif dari mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat, kelompok-kelompok persaudaraan, organisasi sosial, untuk menjadi sumber dari penyelesaian masalah mereka sendiri. Pemberdayaan semacam ini nantinya akan menciptakan iklim partisipasi aktif rakyat untuk mengontrol pemerintah dan menumbuhkan kesadaran bahwa pemerintah sebenarnya adalah milik rakyat.

Penutup

Studi ilmu administrasi kontemporer semakin mendekati diri pada proses – proses administrasi pengelolaan sector public kepada mekanisme tatakelola organisasi swasta. Sulit menarik garis tegas yang membedakan domain private dan domain public. Begitu halnya dalam praktek organisasi. Karakteristik organisasi public dan organisasi private secara rizit tidak mudah diketemukan. Fenomena yang ada justru menunjukkan semakin banyak karakteristik organisasi campuran (*mix – organization*).

Basuki Tjahaya Purnama yang ketika penelitian ini dilakukan menjabat sebagai Wakil Gubernur dan kemudian menjadi

gubernur banyak mengadopsi pemikiran – pemikiran pengelolaan sector private ke dalam tatakelola pemerintahan DKI Jakarta. Sebanyak 187 gagasan pemikiran yang dilontarkan Ahok ke public dan dipublikasikan secara luas oleh media *on line*, dapat dinilai sebagai sebuah gagasan dengan frekuensi yang cukup banyak. Rata – rata perbulan sebanyak 9,5 gagasan terucap selama 24 bulan penelitian ini dilakukan.

Gagasan dan pemikiran Ahok terdistribusi dalam *ten program for reinventing government* (Osborn dan Plastrick, 1992). Kesepuluh prinsip *reinventing government*, prinsip pemerintahan antisipatif, prinsip pemerintahan yang digerakan oleh misi dan prinsip pemerintahan milik masyarakat merupakan prinsip yang paling banyak dikemukakan oleh Ahok. Dengan demikian penelitian ini menyimpulkan bahwa Ahok memiliki kecenderungan untuk mengembangkan model tatakelola pemerintahan DKI Jakarta sesuai dengan konsep Osborn dan Plastrick (1992) tentang *reinventing government*.

Daftar Pustaka

- David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirauahakan Birokrasi*, terj. Abdul Rasyid, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- David osborne dan Peter Plastrick, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, terj. Abdul Rasyid dan Ramelan, Jakarta: PPM, 2000.
- Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Serving, not Steering*, New York: ANSI, 2002.
- Jay M. Shafritz dan Albert C. Hyde, *Classics of Public Administration, USA*: Harcourt Brace & company, 1978.
- John Stuart Mill, *Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative Government*, Vermont: Everyman, 1993.
- Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan?" dalam *Policy Brief*, No. II/PB/2003.
- Agus Dwiyanto, dkk., *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003. *Kompas*, 23 September 2003.
- , "Pemerintahan yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika?" dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP)*, Yogyakarta: MAP UGM, Vol. I, No.2, Juli 1997.
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, cet. keVIII, 2003.
- Inu Kencana Syafi'i, dkk., *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka cipta, 1999.
- Larbi, A. George, 1999. *The Public Management Approach and Crisis States*. United Nations Research Institute For Social Development (UNRISD).
- Tarigan, Antonius, 2003. *Transformasi Model New Governance sebagai kunci menuju optimalisasi pelayanan publik di Indonesia*. *Usahawan* No. 02 TH XXXII Pebruari 2003.